



BUPATI KUNINGAN

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan
Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 47 Tahun
2015, perlu ditetapkan Tata Cara Penetapan, Penyaluran,
Penggunaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Penetapan, Penyaluran dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Tahun
2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1099);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 89);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa; (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa; (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa; (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2017; (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 1 Seri E);
20. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 20);
21. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan; (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 33);
22. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2017; (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2017

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kuningan.
2. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah DPMD Kabupaten Kuningan.

5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Kuningan.
6. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
17. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD, adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

18. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.
19. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
20. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
21. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
22. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas desa.
23. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui rekening kas desa.
24. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
25. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
27. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

ADD yang diberikan dengan maksud untuk membiayai Program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan pada kewenangannya merupakan kewenangan desa.

Pasal 3

Tujuan ADD adalah sebagai berikut :

- a. sebagai sumber penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. sebagai sumber Operasional Pemerintah Desa;
- c. sebagai sumber Tunjangan dan Operasional BPD;
- d. sebagai sumber Operasional RT/ RW;

BDi = Nilai Bobot Desa untuk Desa i;
 ADD = Total ADD se-Kabupaten Kuningan;
 Σ ADM = Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimum.

- (2) Nilai Bobot Desa dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing Nilai Bobot Variabel dengan Koefisien Variabel menggunakan rumus :

$$BDi = a_1KVLW + a_2KVJP + a_3KVJPM + a_4KVKJ + a_5KVJP$$

Keterangan :

BD i = Nilai Bobot Desa untuk Desa i
 a 1 – a 5 = Nilai Bobot masing-masing Variabel
 KVLW = Koefisien Variabel Luas Wilayah
 KVJP = Koefisien Variabel Jumlah Penduduk
 KVJPM = Koefisien Variabel Jumlah Penduduk Miskin
 KVKJ = Koefisien Variabel Keterjangkauan
 KVJPD = Koefisien Variabel Jumlah Perangkat Desa

- (3) Nilai Bobot Variabel ditentukan sebagai berikut:
- a. Variabel Jumlah Penduduk (a1) = 0,30
 - b. Variabel Luas Wilayah (a2) = 0,20
 - c. Variabel Jumlah Penduduk Miskin (a3) = 0,20
 - d. Variabel Keterjangkauan (a4) = 0,20
 - e. Variabel Jumlah Perangkat Desa (a5) = 0,10
- (4) Variabel Jumlah Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bersumber dari data laporan desa dan atau kecamatan
- (5) Variabel Luas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bersumber dari data laporan desa dan atau kecamatan.
- (6) Variabel Jumlah Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bersumber dari data terakhir Badan Pusat Statistik.
- (7) Variabel Keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d bersumber dari data laporan desa dan atau kecamatan.
- (8) Variabel jumlah perangkat desa dimaksud pada ayat (3) huruf e bersumber dari data laporan desa dan atau kecamatan.
- (9) Koefisien Variabel merupakan perbandingan antara Variabel Desa yang bersangkutan dengan jumlah total Variabel Desa se-Kabupaten dengan rumus:

$$KV_i = \frac{V_i}{\Sigma V_i \text{ Kab}}$$

Keterangan :

KV i = Koefisien Variabel Desai
 Vi = Variabel Desai
 Σ ViKab = Jumlah Total Variabel se - Kabupaten Kuningan

- (10) Besaran ADD untuk masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan ini.

BAB IV

MEKANISME PENCAIRAN, PENGGUNAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Pencairan

Pasal 8

ADD dicairkan 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran pada tiap semester, melalui pemindahbukuan dari BUD ke Nomor rekening masing-masing desa, dengan ketentuan :

- a. Tahap 1 dicairkan pada semester I sebesar 60 % (enam puluh per seratus) dari total ADD;
- b. Tahap 2 dicairkan pada semester II sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dari total ADD.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Camat dengan dilampiri:
 - a. RPJM Desa;
 - b. RKP Desa tahun berjalan;
 - c. APB Desa tahun berjalan;
 - d. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun berjalan;
 - e. kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp. 6.000,00 (enamribu rupiah); dan
 - f. fotokopi nomor rekening Kas Desa di Bank Perkreditan Rakyat atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Permohonan pencairan ADD beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim Kecamatan dan diterbitkan rekomendasi Camat tentang Hasil Verifikasi untuk mendapatkan ADD.
- (3) Camat mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati C.q Kepala DPMD dengan dilampiri :
 - a. Rekomendasi tentang hasil verifikasi permohonan pencairan ADD yang diajukan oleh Desa;
 - b. RPJM Desa;
 - c. RKP Desa tahun berjalan;
 - d. APB Desa tahun berjalan;
 - e. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun berjalan;
 - f. Kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah); dan

- g. Fotokopi nomor rekening Kas Desa di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kuningan atas nama Pemerintah Desa.
- (4) Apabila Kepala Desa berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka untuk mengajukan permohonan pencairan ADD dapat ditandatangani oleh Sekretaris Desa atau Penjabat Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) DPMD menginventarisir serta merekap permohonan pencairan ADD dan mengajukan permohonan pencairan dana kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yaitu Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran.
 - (6) Atas permohonan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada BPKAD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
 - (7) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kuningan.
 - (8) Berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kuningan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.
 - (9) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kuningan memerintahkan Bank Persepsi dalam hal ini Bank Jabar Banten Cabang Kuningan mentransfer ke rekening PD. BPR Kuningan untuk selanjutnya ditransfer ke rekening Desa pada PD BPR.

Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 10

- (1) Penggunaan ADD terintegrasi dalam APB Desa.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa maksimal 60% (enam puluh per seratus)
- (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

Pasal 11

Penggunaan ADD minimal 40 % (empat puluh per seratus) untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dalam pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggung jawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Disamping pertanggungjawaban ADD yang terintegrasi dalam pertanggungjawaban APB Desa, desa juga diharuskan untuk membuat laporan realisasi penggunaan ADD per tahapan penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bulan Januari tahun anggaran berikutnya Laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Laporan realisasi penggunaan ADD Tahap II paling lambat minggu keempat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum pada lampiran II peraturan ini, disampaikan Kepada Bupati cq Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan melalui Camat;
- (4) Camat menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai rekapitulasi penggunaan ADD menggunakan format sebagaimana lampiran III Peraturan ini.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 13

- (1) Untuk pembinaan pengelolaan ADD dibentuk Tim Pembina dan Tim Fasilitasi Pengelolaan ADD yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim Pembina Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi ADD;
 - b. menyusun pedoman pelaksanaan ADD;
 - c. menyampaikan usulan besaran ADD yang diterima masing-masing desa kepada Bupati berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan; dan
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD.
- (3) Tim Fasilitasi Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a. memberikan bimbingan dan pelatihan pengelolaan ADD yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
- b. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD dalam setiap proses tahapan kegiatan dengan Tim Pendamping Kecamatan;
- c. memfasilitasi pemecahan masalah pelaksanaan ADD;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Pendamping Kecamatan;
- e. menerima dan mengevaluasi laporan kemajuan desa dalam mengelola ADD dari Tingkat Desa dan Kecamatan;
- f. melaporkan kegiatan ADD kepada Bupati.

Pasal 14

Pembinaan pengelolaan ADD pada Tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat, sebagai bagian dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dengan membentuk Tim Pendamping Kecamatan, yang mempunyai tugas:

- a. melaksanakan verifikasi bidang administrasi dan fisik pelaksanaan ADD;
- b. melaksanakan asistensi dan pembinaan pengelolaan ADD;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD;
- d. memfasilitasi pengelolaan ADD yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
- e. menerima dan mengevaluasi laporan dari Desa tentang pelaksanaan ADD; dan
- f. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan ADD kepada Bupati cq. Kepala BPMD, sebagaimana tercantum dalam lampiran III peraturan ini.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 15

Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD meliputi:

- a. pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan di desa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan tim pelaksana kegiatan;
- b. pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi; dan
- c. pengawasan fungsional dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 9 Maret 2017

BUPATI KUNINGAN



Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 10 Maret 2017



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

YOSEP SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2017 NOMOR 12

DPMD			
PEJABAT	PARA	TGL	KET.
KASI			
KABID			
SEKDIS			
KABAS			
ASISTEN PEM			
SEKDA			
WABUP			

PANGKOP KORDINASI BAK DAERAH			
PEJABAT	PARA	TGL	KET.
KASIBAK			
KABAS			

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 12 Tahun 2017

TANGGAL : 9 - 3 - 2017

TENTANG : TATA CARAPENETAPAN, PENYALURAN, PENGGUNAN
DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2017RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH (Rp)			
			ADDM	ADDV	TOTAL ADD	PEMBULATAN
1	KADUGEDE	SINDANGJAWA	284.029.668	56.233.156	340.262.823	340.262.800
2	KADUGEDE	CIKETAK	284.029.668	41.539.902	325.569.570	325.569.600
3	KADUGEDE	NANGKA	284.029.668	38.878.878	322.908.546	322.908.500
4	KADUGEDE	WINDUJANTEN	284.029.668	48.668.072	332.697.739	332.697.700
5	KADUGEDE	KADUGEDE	284.029.668	76.678.384	360.708.051	360.708.100
6	KADUGEDE	BABATAN	284.029.668	38.137.226	322.166.894	322.166.900
7	KADUGEDE	CIPONDOK	284.029.668	39.524.255	323.553.923	323.553.900
8	KADUGEDE	BAYUNING	284.029.668	60.721.286	344.750.954	344.751.000
9	KADUGEDE	TINGGAR	284.029.668	41.247.919	325.277.587	325.277.600
10	KADUGEDE	CIHERANG	284.029.668	69.962.636	353.992.304	353.992.300
11	KADUGEDE	CISUKADANA	284.029.668	42.687.184	326.716.852	326.716.900
12	KADUGEDE	MARGABAKTI	284.029.668	46.671.058	330.700.726	330.700.700
13	CINIRU	PINARA	284.029.668	93.642.656	377.672.324	377.672.300
14	CINIRU	CIJEMIT	284.029.668	70.467.115	354.496.783	354.496.800
15	CINIRU	CIPEDES	284.029.668	131.380.595	415.410.263	415.410.300
16	CINIRU	CINIRU	284.029.668	54.297.857	338.327.524	338.327.500
17	CINIRU	RAMBATAN	284.029.668	113.807.313	397.836.981	397.837.000
18	CINIRU	LONGKEWANG	284.029.668	49.682.121	333.711.789	333.711.800
19	CINIRU	MUNGKALDATAR	284.029.668	44.683.147	328.712.815	328.712.800
20	CINIRU	GUNUNGMANIK	284.029.668	95.460.137	379.489.805	379.489.800
21	CINIRU	PAMUPUKAN	284.029.668	59.291.617	343.321.285	343.321.300
22	SUBANG	TANGKOLO	284.029.668	76.807.807	360.837.474	360.837.500
23	SUBANG	PAMULIHAN	284.029.668	123.392.785	407.422.453	407.422.500
24	SUBANG	SUBANG	284.029.668	166.954.923	450.984.590	450.984.600
25	SUBANG	GUNUNGACI	284.029.668	89.511.464	373.541.132	373.541.100
26	SUBANG	SITUGEDE	284.029.668	80.216.637	364.246.304	364.246.300
27	SUBANG	BANGUNJAYA	284.029.668	71.411.890	355.441.558	355.441.600
28	SUBANG	JATISARI	284.029.668	100.292.923	384.322.591	384.322.600
29	CIWARU	SUMBERJAYA	284.029.668	84.503.133	368.532.801	368.532.800
30	CIWARU	CILAYUNG	284.029.668	64.425.129	348.454.797	348.454.800
31	CIWARU	CIWARU	284.029.668	135.098.946	419.128.614	419.128.600
32	CIWARU	GARAJATI	284.029.668	87.080.737	371.110.404	371.110.400
33	CIWARU	BAOK	284.029.668	104.523.558	388.553.226	388.553.200
34	CIWARU	ANDAMUI	284.029.668	86.096.960	370.126.628	370.126.600
35	CIWARU	SAGARANTEN	284.029.668	64.000.213	348.029.881	348.029.900
36	CIWARU	CITUNDUN	284.029.668	84.635.400	368.665.068	368.665.100
37	CIWARU	LEBAKHERANG	284.029.668	53.356.801	337.386.469	337.386.500
38	CIWARU	KARANGBARU	284.029.668	66.116.533	350.146.201	350.146.200
39	CIWARU	LINGGAJAYA	284.029.668	67.692.206	351.721.874	351.721.900
40	CIWARU	CITIKUR	284.029.668	60.308.284	344.337.952	344.338.000
41	CIBINGBIN	CIPONDOK	284.029.668	105.621.801	389.651.469	389.651.500
42	CIBINGBIN	SINDANGJAWA	284.029.668	77.231.376	361.261.043	361.261.000
43	CIBINGBIN	CIANGIR	284.029.668	110.766.567	394.796.235	394.796.200
44	CIBINGBIN	CIBINGBIN	284.029.668	181.626.175	465.655.843	465.655.800
45	CIBINGBIN	CITENJO	284.029.668	89.729.981	373.759.648	373.759.600

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH (Rp)			
			ADDM	ADDV	TOTAL ADD	PEMBULATAN
101	KUNINGAN	KASTURI	284.029.668	60.412.691	344.442.358	344.442.400
102	KUNINGAN	PADAREK	284.029.668	53.791.817	337.821.485	337.821.500
103	CIAWIGEBANG	GERESIK	284.029.668	98.983.374	383.013.042	383.013.000
104	CIAWIGEBANG	KADURAMA	284.029.668	57.078.796	341.108.464	341.108.500
105	CIAWIGEBANG	CIAWIGEBANG	284.029.668	91.591.912	375.621.579	375.621.600
106	CIAWIGEBANG	LEBAKSIUH	284.029.668	56.178.126	340.207.794	340.207.800
107	CIAWIGEBANG	CIPUTAT	284.029.668	84.073.083	368.102.750	368.102.800
108	CIAWIGEBANG	PAJAWANLOR	284.029.668	45.404.322	329.433.990	329.434.000
109	CIAWIGEBANG	SIDARAJA	284.029.668	98.035.176	382.064.843	382.064.800
110	CIAWIGEBANG	KAPANDAYAN	284.029.668	64.100.578	348.130.245	348.130.200
111	CIAWIGEBANG	PANGKALAN	284.029.668	74.334.919	358.364.586	358.364.600
112	CIAWIGEBANG	CIOMAS	284.029.668	58.333.167	342.362.835	342.362.800
113	CIAWIGEBANG	SUKARAJA	284.029.668	127.536.763	411.566.430	411.566.400
114	CIAWIGEBANG	CIHAUR	284.029.668	95.409.959	379.439.627	379.439.600
115	CIAWIGEBANG	CIAWILOR	284.029.668	112.831.409	396.861.076	396.861.100
116	CIAWIGEBANG	CIGARUKGAK	284.029.668	91.204.210	375.233.878	375.233.900
117	CIAWIGEBANG	SUKADANA	284.029.668	99.881.838	383.911.506	383.911.500
118	CIAWIGEBANG	CIHIRUP	284.029.668	113.062.529	397.092.197	397.092.200
119	CIAWIGEBANG	KERAMATMULYA	284.029.668	77.035.948	361.065.616	361.065.600
120	CIAWIGEBANG	PAMIJAHAN	284.029.668	58.917.947	342.947.615	342.947.600
121	CIAWIGEBANG	KARANGKAMULYAN	284.029.668	53.835.342	337.865.010	337.865.000
122	CIAWIGEBANG	PADARAMA	284.029.668	70.227.598	354.257.266	354.257.300
123	CIAWIGEBANG	CIKUBANGMULYA	284.029.668	76.481.380	360.511.048	360.511.000
124	CIAWIGEBANG	DUKUHDALEM	284.029.668	46.548.429	330.578.097	330.578.100
125	CIAWIGEBANG	MEKARJAYA	284.029.668	94.053.419	378.083.087	378.083.100
126	CIAWIGEBANG	CIJAGAMULYA	284.029.668	42.319.567	326.349.234	326.349.200
127	CIDAHU	CIHIDEUNG GIRANG	284.029.668	84.278.934	368.308.602	368.308.600
128	CIDAHU	CIHIDEUNGHILIR	284.029.668	126.040.904	410.070.572	410.070.600
129	CIDAHU	CIDAHU	284.029.668	78.482.965	362.512.633	362.512.600
130	CIDAHU	KERTA WINANGUN	284.029.668	61.871.321	345.900.989	345.901.000
131	CIDAHU	DATAR	284.029.668	93.080.982	377.110.650	377.110.700
132	CIDAHU	LEGOK	284.029.668	85.720.891	369.750.559	369.750.600
133	CIDAHU	CIKEUSIK	284.029.668	69.967.553	353.997.220	353.997.200
134	CIDAHU	CIEURIH	284.029.668	100.682.352	384.712.020	384.712.000
135	CIDAHU	CIBULAN	284.029.668	82.825.990	366.855.658	366.855.700
136	CIDAHU	NANGGELA	284.029.668	78.413.082	362.442.750	362.442.700
137	CIDAHU	JATIMULYA	284.029.668	105.663.244	389.692.912	389.692.900
138	CIDAHU	BUNDER	284.029.668	54.198.256	338.227.924	338.227.900
139	JALAKSANA	SUKAMUKTI	284.029.668	79.455.824	363.485.492	363.485.500
140	JALAKSANA	SIDAMULYA	284.029.668	50.285.859	334.315.526	334.315.500
141	JALAKSANA	JALAKSANA	284.029.668	78.544.737	362.574.405	362.574.400
142	JALAKSANA	SANGKANERANG	284.029.668	50.189.242	334.218.910	334.218.900
143	JALAKSANA	SAYANA	284.029.668	46.304.993	330.334.661	330.334.700
144	JALAKSANA	PEUSING	284.029.668	51.743.042	335.772.710	335.772.700
145	JALAKSANA	SEMBAWA	284.029.668	56.592.386	340.622.054	340.622.100
146	JALAKSANA	SADAMANTRA	284.029.668	45.730.298	329.759.966	329.760.000
147	JALAKSANA	MANISKIDUL	284.029.668	78.927.530	362.957.198	362.957.200
148	JALAKSANA	MANISLOR	284.029.668	70.326.152	354.355.820	354.355.800
149	JALAKSANA	CINIRU	284.029.668	38.175.839	322.205.506	322.205.500
150	JALAKSANA	PADAMENAK	284.029.668	37.903.517	321.933.185	321.933.200
151	JALAKSANA	BABAKANMULYA	284.029.668	67.584.527	351.614.195	351.614.200
152	JALAKSANA	SINDANGBARANG	284.029.668	73.964.420	357.994.088	357.994.100
153	JALAKSANA	NANGGERANG	284.029.668	40.064.579	324.094.247	324.094.200
154	CILIMUS	BANDORASA WETAN	284.029.668	60.204.113	344.233.781	344.233.800
155	CILIMUS	BANDORASA KULON	284.029.668	84.266.015	368.295.683	368.295.700

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH (Rp)			
			ADDM	ADDV	TOTAL ADD	PEMBULATAN
156	CILIMUS	LINGGASANA	284.029.668	44.231.247	328.260.915	328.260.900
157	CILIMUS	LINGGAJATI	284.029.668	63.664.436	347.694.103	347.694.100
158	CILIMUS	BOJONG	284.029.668	72.485.858	356.515.526	356.515.500
159	CILIMUS	CILIMUS	284.029.668	100.748.609	384.778.277	384.778.300
160	CILIMUS	SETIANEGARA	284.029.668	69.849.265	353.878.933	353.878.900
161	CILIMUS	CIBEUREUM	284.029.668	54.389.324	338.418.992	338.419.000
162	CILIMUS	KALIAREN	284.029.668	58.375.786	342.405.453	342.405.500
163	CILIMUS	SAMPORA	284.029.668	79.590.486	363.620.154	363.620.200
164	CILIMUS	CARACAS	284.029.668	81.552.621	365.582.289	365.582.300
165	CILIMUS	LINGGAMEKAR	284.029.668	50.940.843	334.970.511	334.970.500
166	CILIMUS	LINGGAINDAH	284.029.668	36.639.089	320.668.756	320.668.800
167	MANDIRANDAN	CIREA	284.029.668	56.652.553	340.682.221	340.682.200
168	MANDIRANDAN	SUKASARI	284.029.668	57.201.185	341.230.853	341.230.900
169	MANDIRANDAN	SEDA	284.029.668	69.112.471	353.142.139	353.142.100
170	MANDIRANDAN	TRIJAYA	284.029.668	52.134.868	336.164.536	336.164.500
171	MANDIRANDAN	RANDOBAWAGIRANG	284.029.668	55.189.566	339.219.234	339.219.200
172	MANDIRANDAN	PAKEMBANGAN	284.029.668	53.751.658	337.781.326	337.781.300
173	MANDIRANDAN	RANDOBA WAILIR	284.029.668	84.174.242	368.203.910	368.203.900
174	MANDIRANDAN	KERTAWINANGUN	284.029.668	64.084.846	348.114.513	348.114.500
175	MANDIRANDAN	MANDIRANCAN	284.029.668	68.446.012	352.475.680	352.475.700
176	MANDIRANDAN	NANGGELA	284.029.668	69.800.979	353.830.647	353.830.600
177	MANDIRANDAN	NANGGERANGJAYA	284.029.668	42.476.392	326.506.059	326.506.100
178	MANDIRANDAN	SALAKADOMAS	284.029.668	37.404.808	321.434.475	321.434.500
179	SELAJAMBE	SELAJAMBE	284.029.668	90.761.079	374.790.746	374.790.700
180	SELAJAMBE	CANTILAN	284.029.668	85.289.289	369.318.956	369.319.000
181	SELAJAMBE	CIBERUNG	284.029.668	85.827.486	369.857.154	369.857.200
182	SELAJAMBE	KUTAWARINGIN	284.029.668	108.929.587	392.959.254	392.959.300
183	SELAJAMBE	JAMBERAMA	284.029.668	86.572.147	370.601.814	370.601.800
184	SELAJAMBE	BAGAWAT	284.029.668	72.709.564	356.739.232	356.739.200
185	SELAJAMBE	PADAHURIP	284.029.668	77.093.547	361.123.215	361.123.200
186	KRAMATMULYA	GEREBA	284.029.668	44.362.646	328.392.314	328.392.300
187	KRAMATMULYA	CILAJA	284.029.668	55.690.202	339.719.869	339.719.900
188	KRAMATMULYA	CIKUBANGSARI	284.029.668	56.918.286	340.947.954	340.948.000
189	KRAMATMULYA	BOJONG	284.029.668	61.936.902	345.966.570	345.966.600
190	KRAMATMULYA	CILOWA	284.029.668	61.567.021	345.596.688	345.596.700
191	KRAMATMULYA	CIBENTANG	284.029.668	40.049.087	324.078.754	324.078.800
192	KRAMATMULYA	RAGAWACANA	284.029.668	55.344.704	339.374.372	339.374.400
193	KRAMATMULYA	PAJAMBON	284.029.668	56.405.677	340.435.345	340.435.300
194	KRAMATMULYA	GANDASOLI	284.029.668	59.185.398	343.215.066	343.215.100
195	KRAMATMULYA	KALAPAGUNUNG	284.029.668	57.768.760	341.798.428	341.798.400
196	KRAMATMULYA	KRAMATMULYA	284.029.668	57.925.615	341.955.283	341.955.300
197	KRAMATMULYA	CIKASO	284.029.668	76.059.372	360.089.039	360.089.000
198	KRAMATMULYA	KARANGMANGU	284.029.668	78.189.883	362.219.551	362.219.600
199	KRAMATMULYA	WIDARASARI	284.029.668	48.991.482	333.021.150	333.021.200
200	DARMA	CIMENGA	284.029.668	98.260.174	382.289.842	382.289.800
201	DARMA	CAGEUR	284.029.668	58.087.767	342.117.435	342.117.400
202	DARMA	SAKERTA BARAT	284.029.668	71.482.681	355.512.349	355.512.300
203	DARMA	SUKARASA	284.029.668	75.520.642	359.550.309	359.550.300
204	DARMA	PANINGGARAN	284.029.668	47.352.601	331.382.269	331.382.300
205	DARMA	CIPASUNG	284.029.668	66.824.178	350.853.846	350.853.800
206	DARMA	KAWAHMANUK	284.029.668	46.093.968	330.123.636	330.123.600
207	DARMA	CIKUPA	284.029.668	51.581.411	335.611.078	335.611.100
208	DARMA	PARUNG	284.029.668	65.055.842	349.085.510	349.085.500
209	DARMA	DARMA	284.029.668	110.377.983	394.407.651	394.407.700
210	DARMA	JAGARA	284.029.668	50.468.271	334.497.939	334.497.900

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH (Rp)			
			ADDM	ADDV	TOTAL ADD	PEMBULATAN
211	DARMA	BAKOM	284.029.668	75.550.459	359.580.127	359.580.100
212	DARMA	KARANGANYAR	284.029.668	58.356.970	342.386.638	342.386.600
213	DARMA	KARANGSARI	284.029.668	59.006.830	343.036.498	343.036.500
214	DARMA	SAGARAHANG	284.029.668	127.435.662	411.465.329	411.465.300
215	DARMA	GUNUNGSIRAH	284.029.668	94.767.784	378.797.452	378.797.500
216	DARMA	SAKERTA TIMUR	284.029.668	66.794.986	350.824.654	350.824.700
217	DARMA	TUGUMULYA	284.029.668	74.335.201	358.364.868	358.364.900
218	DARMA	SITUSARI	284.029.668	49.886.117	333.915.785	333.915.800
219	CIGUGUR	CILEULEUY	284.029.668	62.123.440	346.153.107	346.153.100
220	CIGUGUR	PUNCAK	284.029.668	81.049.326	365.078.994	365.079.000
221	CIGUGUR	GUNUNGKELING	284.029.668	46.710.824	330.740.492	330.740.500
222	CIGUGUR	CISANTANA	284.029.668	107.853.093	391.882.760	391.882.800
223	CIGUGUR	BABAKANMULYA	284.029.668	78.290.868	362.320.536	362.320.500
224	PASAWAHAN	PADABEUNGHAR	284.029.668	84.318.303	368.347.971	368.348.000
225	PASAWAHAN	KADUELA	284.029.668	74.305.548	358.335.215	358.335.200
226	PASAWAHAN	PASAWAHAN	284.029.668	94.032.539	378.062.207	378.062.200
227	PASAWAHAN	CIWIRU	284.029.668	59.604.776	343.634.444	343.634.400
228	PASAWAHAN	CIDAHU	284.029.668	53.403.736	337.433.404	337.433.400
229	PASAWAHAN	CIMARA	284.029.668	54.711.125	338.740.793	338.740.800
230	PASAWAHAN	PANIIS	284.029.668	92.436.859	376.466.527	376.466.500
231	PASAWAHAN	CIBUNTU	284.029.668	48.364.384	332.394.051	332.394.100
232	PASAWAHAN	SINGKUP	284.029.668	41.738.755	325.768.423	325.768.400
233	PASAWAHAN	PADAMATANG	284.029.668	48.051.558	332.081.225	332.081.200
234	NUSAHERANG	HAURKUNING	284.029.668	99.501.084	383.530.752	383.530.800
235	NUSAHERANG	KERTAYUGA	284.029.668	49.713.800	333.743.468	333.743.500
236	NUSAHERANG	WINDUSARI	284.029.668	39.698.407	323.728.075	323.728.100
237	NUSAHERANG	NUSAHERANG	284.029.668	52.190.510	336.220.178	336.220.200
238	NUSAHERANG	JAMBAR	284.029.668	87.032.953	371.062.621	371.062.600
239	NUSAHERANG	CIKADU	284.029.668	66.622.785	350.652.453	350.652.500
240	NUSAHERANG	KERTA WIRAMA	284.029.668	54.165.615	338.195.283	338.195.300
241	NUSAHERANG	CIASIH	284.029.668	37.473.280	321.502.948	321.502.900
242	CIPICUNG	MUNCANGELA	284.029.668	69.442.250	353.471.918	353.471.900
243	CIPICUNG	KAROYA	284.029.668	56.979.041	341.008.709	341.008.700
244	CIPICUNG	SUSUKAN	284.029.668	87.196.949	371.226.616	371.226.600
245	CIPICUNG	CIMARANTEN	284.029.668	56.046.042	340.075.710	340.075.700
246	CIPICUNG	CIPICUNG	284.029.668	52.116.392	336.146.060	336.146.100
247	CIPICUNG	PAMULIHAN	284.029.668	75.094.518	359.124.186	359.124.200
248	CIPICUNG	SALAREUMA	284.029.668	54.792.546	338.822.214	338.822.200
249	CIPICUNG	SUGANANGAN	284.029.668	70.982.958	355.012.626	355.012.600
250	CIPICUNG	SUKAMUKTI	284.029.668	56.547.469	340.577.137	340.577.100
251	CIPICUNG	MEKARSARI	284.029.668	39.927.824	323.957.492	323.957.500
252	PANCALANG	SILEBU	284.029.668	76.774.349	360.804.016	360.804.000
253	PANCALANG	PATALAGAN	284.029.668	65.102.243	349.131.910	349.131.900
254	PANCALANG	KAHIYANGAN	284.029.668	46.930.931	330.960.599	330.960.600
255	PANCALANG	TAJURBUNTU	284.029.668	49.930.720	333.960.388	333.960.400
256	PANCALANG	PANCALANG	284.029.668	63.896.615	347.926.283	347.926.300
257	PANCALANG	SUMBAKELING	284.029.668	47.307.071	331.336.738	331.336.700
258	PANCALANG	SAREWU	284.029.668	54.018.265	338.047.933	338.047.900
259	PANCALANG	SINDANGKEMPENG	284.029.668	50.451.853	334.481.521	334.481.500
260	PANCALANG	RAJA WETAN	284.029.668	50.615.307	334.644.975	334.645.000
261	PANCALANG	TENJOLAYAR	284.029.668	69.592.682	353.622.349	353.622.300
262	PANCALANG	MEKARJAYA	284.029.668	48.716.721	332.746.389	332.746.400
263	PANCALANG	TARIKOLOT	284.029.668	49.217.383	333.247.051	333.247.100
264	PANCALANG	DANALAMPAH	284.029.668	44.223.560	328.253.227	328.253.200
265	JAPARA	GARATENGAH	284.029.668	41.588.484	325.618.152	325.618.200

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH (Rp)			
			ADDM	ADDV	TOTAL ADD	PEMBULATAN
266	JAPARA	RAJADANU	284.029.668	64.186.969	348.216.636	348.216.600
267	JAPARA	SINGKUP	284.029.668	42.110.203	326.139.871	326.139.900
268	JAPARA	JAPARA	284.029.668	58.912.894	342.942.562	342.942.600
269	JAPARA	WANO	284.029.668	38.773.183	322.802.851	322.802.900
270	JAPARA	CITAPEN	284.029.668	47.068.920	331.098.588	331.098.600
271	JAPARA	CENGAL	284.029.668	100.321.291	384.350.959	384.351.000
272	JAPARA	CIKELENG	284.029.668	86.553.117	370.582.785	370.582.800
273	JAPARA	KALIMATI	284.029.668	70.680.513	354.710.181	354.710.200
274	JAPARA	DUKUHDALAM	284.029.668	54.623.641	338.653.309	338.653.300
275	CIMAHI	CILEUYA	284.029.668	126.072.422	410.102.090	410.102.100
276	CIMAHI	MARGAMUKTI	284.029.668	118.641.651	402.671.319	402.671.300
277	CIMAHI	GUNUNGSARI	284.029.668	119.877.854	403.907.522	403.907.500
278	CIMAHI	CIMAHI	284.029.668	102.938.876	386.968.544	386.968.500
279	CIMAHI	KANANGA	284.029.668	85.621.477	369.651.145	369.651.100
280	CIMAHI	CIKEUSAL	284.029.668	93.899.206	377.928.874	377.928.900
281	CIMAHI	MEKARJAYA	284.029.668	91.059.820	375.089.488	375.089.500
282	CIMAHI	SUKAJAYA	284.029.668	79.137.324	363.166.992	363.167.000
283	CIMAHI	MULYAJAYA	284.029.668	67.489.443	351.519.111	351.519.100
284	CIMAHI	CIMULYA	284.029.668	75.518.346	359.548.014	359.548.000
285	CILEBAK	LEGOKHERANG	284.029.668	106.902.725	390.932.393	390.932.400
286	CILEBAK	BUNGURBERES	284.029.668	87.113.892	371.143.560	371.143.600
287	CILEBAK	CILEBAK	284.029.668	80.389.490	364.419.158	364.419.200
288	CILEBAK	JALATRANG	284.029.668	88.573.616	372.603.284	372.603.300
289	CILEBAK	PATALA	284.029.668	91.293.963	375.323.631	375.323.600
290	CILEBAK	MANDAPAJAYA	284.029.668	123.861.384	407.891.051	407.891.100
291	CILEBAK	CILIMUSARI	284.029.668	70.201.683	354.231.350	354.231.400
292	HANTARA	CITAPEN	284.029.668	50.981.860	335.011.528	335.011.500
293	HANTARA	PASIRAGUNG	284.029.668	45.257.684	329.287.352	329.287.400
294	HANTARA	TUNDAGAN	284.029.668	95.210.010	379.239.678	379.239.700
295	HANTARA	BUNIGEULIS	284.029.668	88.547.864	372.577.531	372.577.500
296	HANTARA	HANTARA	284.029.668	67.363.925	351.393.592	351.393.600
297	HANTARA	PAKAPASAN GIRANG	284.029.668	61.925.671	345.955.339	345.955.300
298	HANTARA	CIKONDANG	284.029.668	49.268.918	333.298.586	333.298.600
299	HANTARA	PAKAPASAN HILIR	284.029.668	51.486.632	335.516.300	335.516.300
300	KALIMANGGIS	KALIMANGGIS KULON	284.029.668	112.831.658	396.861.326	396.861.300
301	KALIMANGGIS	PARTAWANGUNAN	284.029.668	51.665.202	335.694.869	335.694.900
302	KALIMANGGIS	CIPANCUR	284.029.668	94.789.290	378.818.957	378.819.000
303	KALIMANGGIS	KERTAWANA	284.029.668	108.433.243	392.462.910	392.462.900
304	KALIMANGGIS	WANASARAYA	284.029.668	80.235.542	364.265.209	364.265.200
305	KALIMANGGIS	KALIMANGGIS WETAN	284.029.668	105.899.467	389.929.135	389.929.100
306	CIBEUREUM	CIMARA	284.029.668	94.124.411	378.154.079	378.154.100
307	CIBEUREUM	SUMURWIRU	284.029.668	56.936.664	340.966.332	340.966.300
308	CIBEUREUM	CIBEUREUM	284.029.668	137.745.630	421.775.297	421.775.300
309	CIBEUREUM	TARIKOLOT	284.029.668	62.395.596	346.425.264	346.425.300
310	CIBEUREUM	RANDUSARI	284.029.668	78.106.029	362.135.696	362.135.700
311	CIBEUREUM	SUKADANA	284.029.668	62.425.335	346.455.002	346.455.000
312	CIBEUREUM	KAWUNGSARI	284.029.668	54.285.335	338.315.003	338.315.000
313	CIBEUREUM	SUKARAPIH	284.029.668	95.162.332	379.192.000	379.192.000
314	KARANGKANCANA	KARANGKANCANA	284.029.668	105.769.685	389.799.353	389.799.400
315	KARANGKANCANA	KADUAGUNG	284.029.668	76.926.853	360.956.521	360.956.500
316	KARANGKANCANA	SEGONG	284.029.668	85.830.769	369.860.437	369.860.400
317	KARANGKANCANA	TANJUNGKERTA	284.029.668	91.225.234	375.254.902	375.254.900
318	KARANGKANCANA	SUKASARI	284.029.668	70.330.467	354.360.135	354.360.100
319	KARANGKANCANA	MARGACINA	284.029.668	79.218.436	363.248.104	363.248.100
320	KARANGKANCANA	JABRANTI	284.029.668	100.110.486	384.140.154	384.140.200

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH (Rp)			
			ADDM	ADDV	TOTAL ADD	PEMBULATAN
321	KARANGKANCANA	SIMPAY JAYA	284.029.668	74.191.977	358.221.645	358.221.600
322	KARANGKANCANA	CIHANJARO	284.029.668	76.197.559	360.227.227	360.227.200
323	MALEBER	GARAJAJI	284.029.668	48.986.508	333.016.176	333.016.200
324	MALEBER	GALAJERANG	284.029.668	89.525.774	373.555.442	373.555.400
325	MALEBER	CIPAKEM	284.029.668	182.936.015	466.965.682	466.965.700
326	MALEBER	MALEBER	284.029.668	65.294.962	349.324.630	349.324.600
327	MALEBER	PARAKAN	284.029.668	66.654.212	350.683.880	350.683.900
328	MALEBER	KUTARAJA	284.029.668	66.176.104	350.205.772	350.205.800
329	MALEBER	CIPORANG	284.029.668	48.389.532	332.419.200	332.419.200
330	MALEBER	DUKUHTENGAH	284.029.668	47.077.229	331.106.897	331.106.900
331	MALEBER	KARANGTENGAH	284.029.668	40.912.623	324.942.291	324.942.300
332	MALEBER	MEKARSARI	284.029.668	128.694.666	412.724.334	412.724.300
333	MALEBER	PADAMULYA	284.029.668	90.762.537	374.792.205	374.792.200
334	MALEBER	CIKAHURIPAN	284.029.668	93.119.524	377.149.192	377.149.200
335	MALEBER	KUTAMANDARAKAN	284.029.668	45.279.470	329.309.138	329.309.100
336	MALEBER	MANDALAJAYA	284.029.668	51.048.370	335.078.038	335.078.000
337	MALEBER	GIRIWARINGIN	284.029.668	87.568.033	371.597.701	371.597.700
338	MALEBER	BUNIASIH	284.029.668	41.236.332	325.266.000	325.266.000
339	SINDANGAGUNG	SINDANGSARI	284.029.668	62.614.999	346.644.667	346.644.700
340	SINDANGAGUNG	KADUAGUNG	284.029.668	53.190.012	337.219.680	337.219.700
341	SINDANGAGUNG	KERTAUNGERAN	284.029.668	54.259.026	338.288.694	338.288.700
342	SINDANGAGUNG	SINDANGAGUNG	284.029.668	75.584.095	359.613.763	359.613.800
343	SINDANGAGUNG	BALONG	284.029.668	56.028.528	340.058.196	340.058.200
344	SINDANGAGUNG	KERTAYASA	284.029.668	56.633.937	340.663.605	340.663.600
345	SINDANGAGUNG	KERTAWANGUNAN	284.029.668	59.057.774	343.087.442	343.087.400
346	SINDANGAGUNG	BABAKANREUMA	284.029.668	73.820.803	357.850.471	357.850.500
347	SINDANGAGUNG	TIRTAWANGUNAN	284.029.668	41.967.140	325.996.808	325.996.800
348	SINDANGAGUNG	DUKUH LOR	284.029.668	51.371.984	335.401.652	335.401.700
349	SINDANGAGUNG	TARAJU	284.029.668	68.839.960	352.869.628	352.869.600
350	SINDANGAGUNG	MEKARUMUKTI	284.029.668	47.049.188	331.078.856	331.078.900
351	CIGANDAMEKAR	BUNIGEULIS	284.029.668	64.739.935	348.769.602	348.769.600
352	CIGANDAMEKAR	JAMBUGEULIS	284.029.668	61.641.400	345.671.068	345.671.100
353	CIGANDAMEKAR	KOREAK	284.029.668	60.719.870	344.749.538	344.749.500
354	CIGANDAMEKAR	KARANGMUNCANG	284.029.668	70.792.309	354.821.976	354.822.000
355	CIGANDAMEKAR	SANGKANURIP	284.029.668	76.428.893	360.458.561	360.458.600
356	CIGANDAMEKAR	PANAWUAN	284.029.668	51.437.654	335.467.322	335.467.300
357	CIGANDAMEKAR	TIMBANG	284.029.668	87.491.268	371.520.936	371.520.500
358	CIGANDAMEKAR	BABAKANJATI	284.029.668	47.071.905	331.101.573	331.101.600
359	CIGANDAMEKAR	INDAPATRA	284.029.668	45.838.447	329.868.115	329.868.100
360	CIGANDAMEKAR	CIBUNTU	284.029.668	59.660.113	343.689.781	343.689.800
361	CIGANDAMEKAR	SANGKANMULYA	284.029.668	58.698.138	342.727.806	342.727.800
JUMLAH			102.534.710.080	25.633.677.520	128.168.387.600	128.168.387.600

BUPATI KUNINGAN

DPMD			
PEJABAT	PARAF	TGL	KET.
KASI	<i>[Signature]</i>		
SEK. D	<i>[Signature]</i>		
SEK. S	<i>[Signature]</i>		
KASUB	<i>[Signature]</i>		
STEN. PEM			
DA			
UP	<i>[Signature]</i>		

ACEP PURNAMA

PARAF BUNIHAN BAS. MUNCANG			
PEJABAT	PARAF	TGL	KET.
KASUB PAS.	<i>[Signature]</i>		
KASAS.			

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 12/2017
 TANGGAL : 9-3-17
 TENTANG : TATA CARA PENETAPAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2017

REKAPITULASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2017

DESA :
 KECAMATAN :
 TAHAP :

BUPATI KUNINGAN			
PEJABAT	PARAF	TGL	KET
KABID BAG.			
KABAS			

JUMLAH PENERIMAAN ADD : Rp

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	(a+b+dst)
	a.	
	b.	
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	(a+b+dst)
	a.	
	b.	
	dst	
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	(a+b+dst)
	a.	
	b.	
	dst	
4	BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	(a+b+dst)
	a.	
	b.	
	dst	
5	BIDANG BIAYA TIDAK TERDUGA	(a+b+dst)
	a.	
	b.	
	Dst	
6	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	(a+b+dst)
	c. Pembentukan Dana Cadangan	
	d. Penyertaan Modal	
	JUMLAH PENGGUNAAN (1+2+3+4+5+6)	
	SISA	

.....,2017
 KEPALA DESA.....

DPMD			
PEJABAT	PARAF	TGL	KET.
KASI			
KABID			
SEKDIS			
KADIS			
ASISTEN PEM			
SEKDA			
BUP			

BUPATI KUNINGAN

ACEP PURNAMA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KUNINGAN
 NOMOR : 12/2017
 TANGGAL : 03-11-2017
 TENTANG : TATA CARA PENETAPAN, PENYALURAN,
 PENGGUNAAN DAN PELAPORAN ALOKASI
 DANA DESA TAHUN 2017

REKAPITULASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2017
 TAHAP

KECAMATAN

DESA	JUMLAH ADD DITERIM A	REALISASI PENGGUNAAN ADD (Rp)						SISA (3-9)	CATATAN	
		BIDANG PEMERINTAHAN/PEMBANGUNAN	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	BIAYA TIDAK TERDUGA	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	TOTAL (4+5+6+7+8)			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.....										
.....										
.....										
.....										
.....										
.....										

.....CAMAT2017

DPMD

PEJABAT	PARAM	TGL	KET.
KASI			
K BID			
SEKDIS			
KASUB			
ASISTEN PEM			
SEKDA			
WABUP			

.....

BUPATI KUNINGAN

PARAF KORDINASI BAG. HUMAS	
PEJABAT	TGL
KABUS. WABUP	KET.
.....

